



Kementerian Agama
Republik Indonesia

PETA JALAN **PENGUATAN** **MODERASI BERAGAMA**

Tahun 2020-2024



Disusun oleh:
Kelompok Kerja Moderasi Beragama
Kementerian Agama Republik Indonesia

Daftar Isi

3 ● **Pendahuluan**
Landasan hukum dan urgensi Moderasi Beragama di Indonesia

7 ● **Rumusan Moderasi Beragama**
Rumusan, indikator, muatan pesan keagamaan dalam Moderasi Beragama

11 ● **Ekosistem Moderasi Beragama**
Analisis situasi, ekosistem dan tujuh kelompok strategis yang mempengaruhi Moderasi Beragama

15 ● **Indikator Kinerja Tahun 2024**
Indikator kinerja tahun 2024 lingkup Penguatan Moderasi Beragama sesuai dengan RPJMN 2020-2024

17 ● **Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan Moderasi Beragama**
Arah kebijakan dan strategi Penguatan Moderasi Beragama sebagaimana disebut dalam RPJMN dan Renstra Kemenag 2020-2024

25 ● **Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama**
Peta jalan dan strategi implementasi Penguatan Moderasi Beragama tahun 2021-2024

Pendahuluan

Landasan hukum dan urgensi Moderasi Beragama di Indonesia



Dasar Hukum



Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Pasal 29 ayat (2)

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Pasal 22 ayat (2)

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Pasal 2

Program Prioritas memperkuat moderasi beragama, yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama

Lampiran III

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong

Lampiran I

Urgensi Moderasi Beragama

Tantangan 2

Berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik

Kondisi kebangsaan dan keagamaan

Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk. Meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara

Memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan

Merawat Keindonesiaan

Tantangan 1

Berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem), yang mengesampingkan martabat kemanusiaan

Tantangan 3

Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI

Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama

Toleran, Harmonis, Damai

Moderasi Beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran sehingga Indonesia maju.

Penyelarasan Relasi Agama dan Negara

Penguatan Moderasi Beragama pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur

Agama dan Politik

Menjadikan nilai agama sebagai fatsoen politik, bukan mempermainkan agama untuk kepentingan politik

Agama dan Hukum

Menekankan tujuan penerapan hukum yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan bersama, tanpa harus terlalu memaksakan formalisasi hukum agama

Agama dan Layanan Publik

Menyelenggarakan pelayanan publik secara adil untuk memenuhi hak-hak sipil tanpa diskriminasi

Agama dan Ekspresi Publik

Memberikan kebebasan mengekspresikan agama di ruang publik sesuai koridor hukum

Rumusan Moderasi Beragama

Rumusan, indikator, muatan pesan keagamaan
dalam Moderasi Beragama



Rumusan

Moderasi Beragama



MODERASI, menurut kamus bahasa:

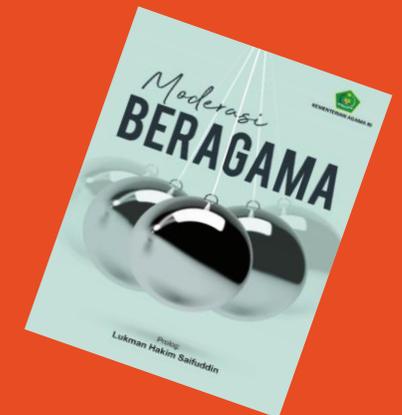
- **Bahasa Indonesia:** 1. pengurangan kekerasan dan 2. penghindaran keekstreman.
- **Bahasa Latin:** ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan).
- **Bahasa Inggris:** *core* (inti, esensi), *standard* (etika).
- **Bahasa Arab:** *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang).



Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama - yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum - berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa



Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama.



BATASAN EKSTREM

cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan

ATAS NAMA AGAMA:

1

mencederai
nilai luhur
kemanusiaan

2

melabrak
kesepakatan bersama
dalam kehidupan
bermasyarakat dan
bernegara

3

melanggar ketentuan
hukum yang menjadi
panduan
bermasyarakat dan
bernegara

Indikator

Moderasi Beragama

Moderasi Beragama bukan hal absurd yang tak bisa diukur. Keberhasilan Moderasi Beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya empat indikator utama berikut ini serta beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan:

1

Komitmen kebangsaan

Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi: UUD 1945 dan regulasi di bawahnya

Toleransi

Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama.

2

3

Anti kekerasan

Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan

Penerimaan terhadap tradisi

Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama

4

Muatan Pesan Keagamaan

dalam Moderasi Beragama

Dalam memperkuat muatan Moderasi Beragama terdapat beberapa pesan dasar yang perlu terus digaungkan:

1

Menjaga Keselamatan Jiwa

Mencegah hal-hal buruk yang dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia.

2

Menjunjung Tinggi Keadaban Mulia

Menjadikan nilai-nilai moral universal dan pokok ajaran agama sebagai pandangan hidup (*world view*) dengan tetap berpijak pada jati diri Indonesia

3

Menghormati Harkat Martabat Kemanusiaan

Mengutamakan sikap memanusiakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama

4

Memperkuat Nilai Moderat

Mempromosikan dan mengejawantahkan pengamalan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah

5

Mewujudkan Perdamaian

Menebar kebajikan dan kedamaian, mengatasi konflik dengan prinsip adil dan berimbang serta berpedoman pada konstitusi

6

Menghargai Kemajemukan

Menjaga kebebasan akal, berekspresi, dan beragama. Menerima keberagaman sebagai anugerah, dan karenanya bersikap terbuka terhadap perbedaan

7

Menaati Komitmen Berbangsa

Menjadikan konstitusi sebagai panduan kehidupan umat beragama dalam berbangsa dan bernegara, serta menaati aturan hukum dan kesepakatan bersama

Ekosistem Moderasi Beragama

Analisis situasi, ekosistem dan tujuh
kelompok strategis yang mempengaruhi
Moderasi Beragama



Analisis Situasi

Penguatan Moderasi Beragama

KEKUATAN

- Paham moderat dalam beragama sudah lama mengakar di masyarakat Nusantara
- Berbagai tradisi keagamaan merupakan hasil asimilasi dan akulturasi nilai agama dan budaya lokal
- Para pendiri bangsa berbeda agama bersatu mewujudkan Indonesia berdasarkan 4 Pilar Kebangsaan.
- Organisasi berbasis keagamaan berpengaruh besar dalam kehidupan beragama dan berbangsa
- FKUB telah berdiri sampai tingkat kabupaten/kota
- Moderasi Beragama masuk dalam RPJMN 2020-2024

KELEMAHAN

- Kurang komitmen terhadap ideologi Pancasila di semua level
- Banyak tokoh agama yang populis tapi minim pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran
- Populisme agama, politik identitas, dan sikap mayoritarianisme dalam berdemokrasi
- Minim peran keluarga dalam mencegah perilaku ekstrem
- Minim budaya literasi media dan referensi beragama dalam bingkai NKRI
- Kementerian/lembaga belum sinergi dan tak sinkron dalam pengelolaan urusan agama dan hak sipil
- Regulasi Moderasi Beragama belum memadai

SWOT

PELUANG

- Indonesia berkesempatan tampil sebagai negara-bangsa teladan bagi dunia yang mampu mengelola kemajemukan
- Moderasi Beragama menjadi modal dasar sosial pembangunan mewujudkan cita-cita negara
- Masyarakat mendukung kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun dan damai
- Indonesia berkesempatan mempercepat pemenuhan SDGs melalui hasil Moderasi Beragama

TANTANGAN

- Gejala transnasionalisme yang menumbuhkan kelompok ekstrem beragama
- Kapitalisme global yang melemahkan nilai-nilai agama
- Persaingan hegemoni melalui komodifikasi agama
- Politik identitas berbasis agamaw
- Era disrupti inovasi yang menyingkirkan otoritas keagamaan, menyuburkan gejala "umat digital" dan "urban religiosity"



Ekosistem

Penguatan Moderasi Beragama

Moderasi Beragama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertautan. Setiap faktor berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks. Penguatan Moderasi Beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerja sama.

NEGARA

Ideologi, paradigma konstitusional, kebijakan, program dan layanan, regulasi dan penegakan hukum, desentralisasi, sistem ekonomi, aktor negara

POLITIK

Praktik politik kekuasaan dan kebangsaan, populisme

MEDIA

Komodifikasi kasus agama, kemerdekaan berpendapat, distorsi informasi, disrupti otoritas keagamaan

KEAGAMAAN

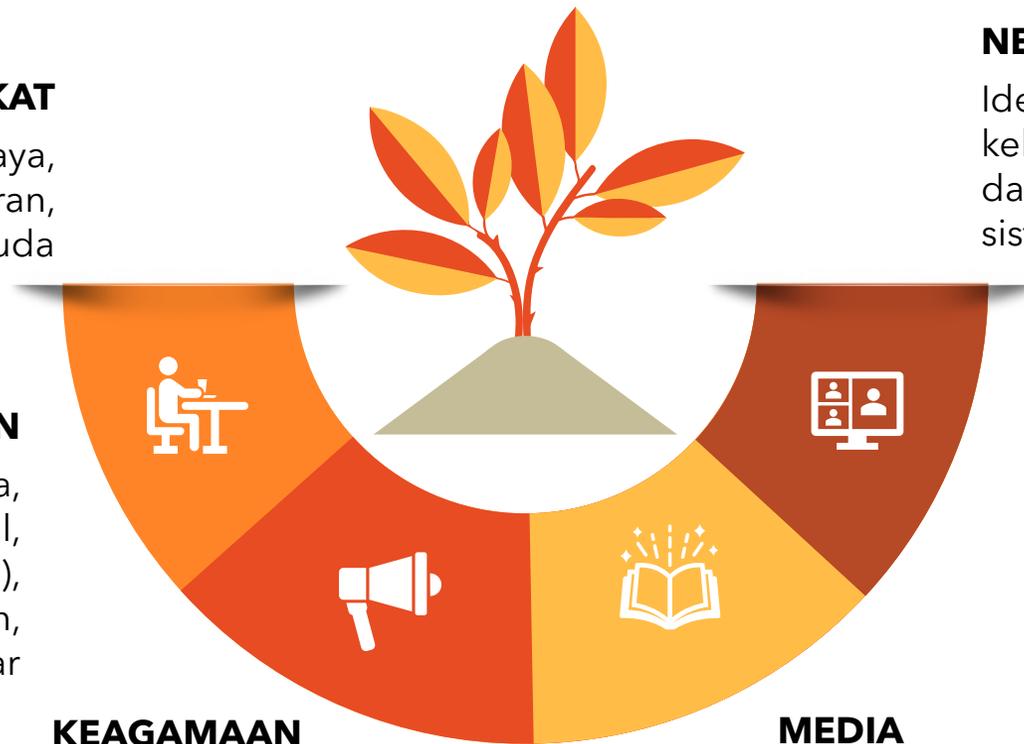
Pemuka agama, organisasi berbasis keagamaan, rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama, komodifikasi agama

PENDIDIKAN

Penanaman nilai-nilai agama, pendidikan formal dan nonformal, pendidikan masyarakat (informal), pendidik, pengelola pendidikan, bahan ajar

MASYARAKAT

Praktik keberagaman, budaya, keluarga, keterlibatan, kepeloporan, perempuan, dan anak muda



7 Kelompok Strategis

Penguatan Moderasi Beragama

Terdapat 7 kelompok yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Penguatan Moderasi Beragama pada ketujuh kelompok ini akan mempercepat pengarusutamaan Moderasi Beragama di Indonesia.



Birokrasi

Penguatan perspektif Moderasi Beragama bagi birokrat, untuk pemenuhan hak sipil dan hak beragama warga negara Indonesia



Dunia Pendidikan

Penanaman nilai-nilai Moderasi Beragama dan pengelolaan institusi pendidikan secara non diskriminatif



TNI/Polri

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan hukum dengan perspektif pemenuhan hak konstitusi dan perspektif Moderasi Beragama



Media

Pengayaan literasi masyarakat sebagai pembentuk nilai-nilai kolektif, pengurangan sentimen kebencian



Masyarakat Sipil

Penguatan peran & kapasitas tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, budayawan, organisasi berbasis agama, pengelola rumah ibadah, ormas sipil, keluarga, perempuan, dan anak muda



Partai Politik

Penguatan praktik politik bermartabat nir-SARA



Dunia Bisnis

Pengembangan ekonomi inklusif dan keterlibatan dunia bisnis dalam penguatan Moderasi Beragama

Indikator Kinerja Tahun 2024

Indikator kinerja tahun 2024 lingkup
Penguatan Moderasi Beragama sesuai
dengan RPJMN 2020-2024



Indikator Kinerja

Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2024

	2019	2024	
Indeks Kesalehan Umat Beragama	83,56	86,08	Kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama para umat beragama melalui kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah
Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya	n/a	76,00	Keselarasan relasi agama dan budaya melalui sikap akomodatif umat beragama terhadap budaya dan penurunan konflik bernuansa agama
Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,83	75,80	Menggambarkan realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan melalui sikap toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama

Pemerintah memperkuat Moderasi Beragama sebagai modal sosial pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat konstitusi. Meskipun terdapat institusi negara yang menjadi *leading sector*, pengejawantahan Moderasi Beragama adalah tugas semua pemangku kepentingan.



Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan Moderasi Beragama

Arah kebijakan dan strategi Penguatan Moderasi Beragama sebagaimana disebut dalam RPJMN dan Renstra Kemenag 2020-2024



Arah Kebijakan

Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024

Kebijakan memperkuat Moderasi Beragama didasarkan pada paradigma:

- Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi.
- Negara memposisikan diri *"in between"*: tidak boleh terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan.
- Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan.



Strategi Penguatan Moderasi Beragama*

Penyiaran Agama

Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat

Sistem Pendidikan

Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderasi beragama mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru

Pengelolaan Rumah Ibadat

Pengelolaan rumah ibadat sebagai pusat syiar agama yang toleran

Pengelolaan Ruang Publik

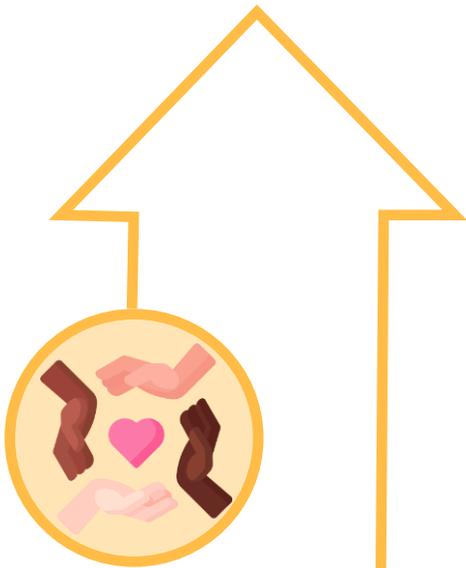
Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa

Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan Lainnya

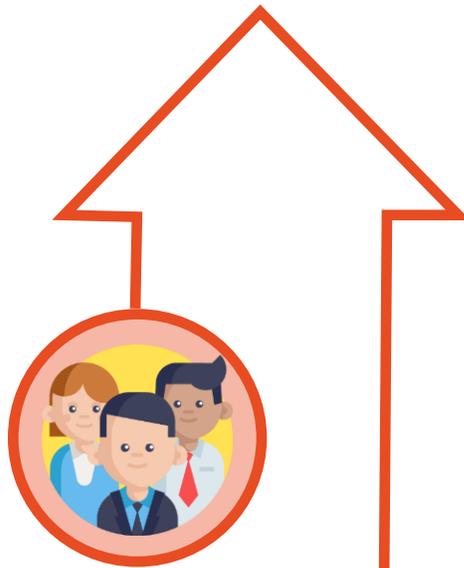
Penguatan peran pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan

*Dikutip dari RPJMN dan Renstra Kemenag 2020-2024

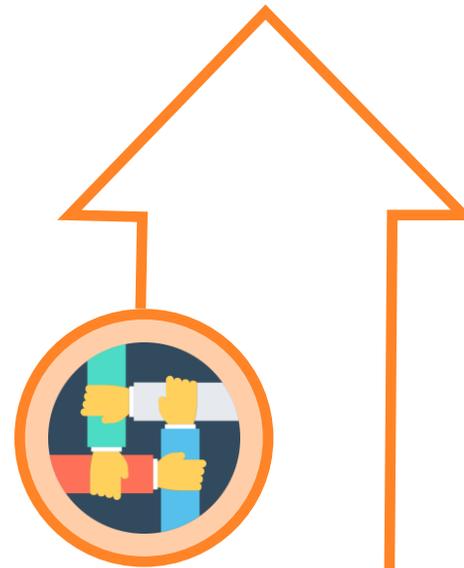




Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama



Penguatan peran lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa



Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong

Kunci Harmonisasi Umat Beragama

Harmonisasi umat beragama dapat tercapai jika:

- Masyarakat terlindungi hak sipil dan hak beragamanya
- Para tokoh dan lembaga kunci mampu memainkan peran untuk menjaga situasi yang kondusif bagi terciptanya kerukunan dan solidaritas sosial demi kemaslahatan bangsa

Apresiasi terhadap ekspresi budaya berbasis nilai agama, pengembangan literasi khazanah budaya, dan pelestarian situs dan perayaan keagamaan dan budaya memperkuat toleransi

Relasi Agama dan Budaya

Apresiasi Budaya

Penghargaan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan agama



Literasi Budaya

Pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama

Dialog Lintas Agama dan Budaya

Penguatan dialog lintas agama dan budaya



Perayaan Keagamaan dan Budaya

Pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi



Tafsir Keagamaan

Pengembangan tafsir keagamaan berperspektif budaya



Pelestarian Budaya

Pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk mensejahterakan umat

Pelayanan Publik

Fasilitasi Pelayanan

Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan yang akuntabel serta bersifat inklusif dan non-diskriminatif.



Bimbingan Keluarga

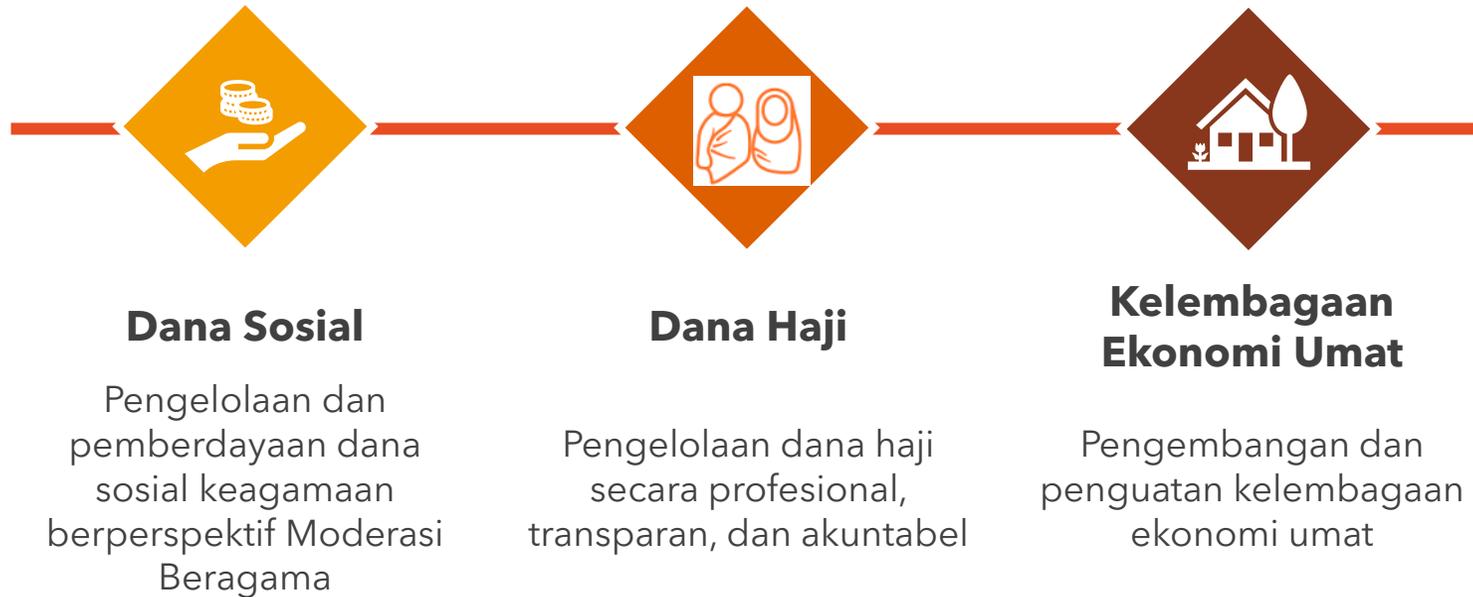
Peningkatan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah berwatak moderat.

Haji dan Umrah

peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah dengan menerapkan hukum fikih yang bertumpu pada pertimbangan realitas sosial, guna menghadirkan kemaslahatan bersama sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin.

Jaminan Produk Halal

Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai nilai tambah ekonomi sehingga umat lain turut merasakan manfaatnya. Pelayanan sertifikasi halal sebagai jaminan kepastian hukum terkait produk halal, dan bukan untuk menciptakan segregasi pangsa pasar.



Penguatan Ekonomi Umat secara profesional, produktif, inklusif

Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan secara profesional agar dapat dimanfaatkan untuk sebaik-baik kemaslahatan masyarakat.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keagamaan secara profesional, produktif dan inklusif akan meningkatkan kesejahteraan umat dan berkontribusi bagi ekonomi nasional.

Moderasi Beragama adalah modal sosial bangsa Indonesia agar mendapatkan manfaat lebih besar dari iklim usaha yang sehat dan ramah investasi. Moderasi Beragama juga menjamin terpenuhinya hak umat beragama untuk menginternalisasikan nilai-nilai ajaran agama dalam praktik ekonomi dan perilaku bisnis di Indonesia.

Program Penguatan Moderasi Beragama

di Kementerian/Lembaga

Selaras dengan RPJMN, setiap kementerian/lembaga menjalankan Penguatan Moderasi Beragama dalam kehidupan beragama di institusi dan pemangku kepentingannya. Hal ini untuk menjamin pemenuhan hak beragama dan hak sipil dalam program dan layanan publik yang inklusif.

Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama berperspektif Moderasi Beragama pada Aparatur Negara

Pelindungan hak beragama dalam program dan layanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi K/L

Penguatan perspektif Moderasi Beragama dalam pengelolaan rumah ibadah di lingkungan K/L

Pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya di lingkungan K/L untuk memperkuat toleransi

Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama

Peta jalan dan strategi implementasi Penguatan
Moderasi Beragama tahun 2021-2024

26



Peta Jalan

Penguatan Moderasi Beragama pada Kementerian Agama

No	Kegiatan Prioritas (KP)	2021	2022	2023	2024
		Penguatan Perspektif Moderasi Beragama dalam Institusi	Penyelenggaraan Layanan dan Program Keagamaan berperspektif Moderasi Beragama	Penguatan Peran Masyarakat dalam Penguatan Moderasi Beragama	Peneguhan dan Apresiasi Negara dan Bangsa Berperspektif Moderasi Beragama
1	Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kerangka kerja tingkat Pusat dan Daerah• Penyiapan rencana aksi dan instrumen implementasi Penguatan Moderasi Beragama	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan dan penguatan pelayanan publik berperspektif Moderasi Beragama• Pelibatan pemangku kepentingan dalam implementasi Moderasi Beragama	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan pelibatan pemangku kepentingan dengan fasilitasi program masyarakat untuk implementasi Moderasi Beragama• Peningkatan fasilitasi program masyarakat sesuai tugas dan fungsi• Penguatan peran media dalam sosialisasi perspektif moderasi beragama	<ul style="list-style-type: none">• Tercapainya indeks-indeks sesuai target• Pemenuhan regulasi akan hak sipil berbasis Moderasi Beragama• Penurunan jumlah kasus konflik atas nama agama• Apresiasi implementasi Moderasi Beragama
2	Penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama				
3	Penyelarasan relasi agama dan budaya	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan anggaran• Program Penguatan Moderasi Beragama berbasis tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none">• Sinergi dan sinkronisasi regulasi terkait Penguatan Moderasi Beragama		
4	Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag			
5	Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan				



Peta Jalan

Penguatan Moderasi Beragama pada Lingkup Nasional

No	Kegiatan Prioritas (KP)	2021	2022	2023	2024
		Pengembangan Infrastruktur Penguatan Perspektif Moderasi Beragama	Penguatan Perspektif dan Kapasitas Penyelenggara Negara & Lembaga Keagamaan dalam Pengarusutamaan Perspektif Moderasi Beragama	Pengarusutamaan Perspektif Moderasi Beragama dalam Kehidupan Keberagamaan Indonesia di semua lini	Peneguhan Kerukunan Umat Beragama dan Kehidupan Keberagamaan Berperspektif Moderasi Beragama
1	Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan penyelarasan konsep dan kerangka kerja Moderasi Beragama 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan perspektif dan kapasitas penyelenggara negara. 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi penguatan Moderasi Beragama oleh penyelenggara negara. 	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya Indeks KUB, Indeks Kesalehan Umat Beragama, dan Indeks Penerimaan Umat Beragama atas keragaman budaya
2	Penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan regulasi perspektif Moderasi Beragama 	<ul style="list-style-type: none"> Pelibatan kelompok-kelompok kunci dalam Penguatan Moderasi Beragama 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelibatan tokoh publik dan organisasi berpengaruh dalam penguatan Moderasi Beragama 	<ul style="list-style-type: none"> Rekognisi dan afirmasi kepada pelaku Moderasi Beragama
3	Penyelarasan relasi agama dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan dukungan kebijakan dan anggaran Kementerian/Lembaga di tingkat pusat sampai pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Sinergi dan sinkronisasi regulasi terkait Penguatan Moderasi Beragama 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan afirmasi penguatan Moderasi Beragama 	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya target rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
4	Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kelembagaan Moderasi Beragama 	<ul style="list-style-type: none"> Kajian awal Program Pengarusutamaan Moderasi Beragama pada target utama RPJMN 	<ul style="list-style-type: none"> Pelibatan media dalam program Penguatan Moderasi Beragama 	<ul style="list-style-type: none"> Moderasi Beragama menjadi perspektif utama dalam dunia pendidikan
5	Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan				<ul style="list-style-type: none"> Media masa menjadi agen Penguatan Moderasi Beragama



Strategi Implementasi

Penguatan Moderasi Beragama di Tingkat Nasional

POKJA MODERASI BERAGAMA

- Penguatan struktur Pokja sebagai *Central Transformation Office (CTO)* dan *Center of Excellent (COE)* Moderasi Beragama tingkat Nasional
- Pengembangan konsep dan kerangka kerja Moderasi Beragama
- Peningkatan fungsi pengendali konsolidasi Gerakan Moderasi Beragama
- Regulasi yang mengikat seluruh kementerian/lembaga/pemda
- Fasilitasi Sumber Daya (SDM, penganggaran dan sarana prasarana)

KEMENTERIAN AGAMA

- Kajian praktik keberagamaan, regulasi, bahan ajar terkait MB
- Sosialisasi dan penyelarasan konsep dan kerangka kerja MB
- Koordinasi tingkat unit eselon I
- Kerangka kerja implementasi per unit eselon I:
 - penguatan MB berdasar tuisi bagi ASN Kemenag
 - inovasi intervensi penguatan MB dalam layanan dan program
- Pengusulan jabatan fungsional pranata moderasi beragama
- Peningkatan kapasitas pusdiklat Kemenag RI untuk Penguatan Moderasi Beragama

PENYELENGGARA NEGARA

- Sosialisasi Kerangka Konseptual dan Kerangka Kerja MB
- Koordinasi lintas KL/Pemda
- Strategi komunikasi publik untuk promosi nilai-nilai MB
- PPMB sebagai bagian dari penilaian kinerja dalam Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental
- Penyediaan referensi dan peningkatan literasi Moderasi Beragama
- Fasilitasi ruang dialog dan ruang publik MB

LEMBAGA KEAGAMAAN

- Pelibatan lembaga agama, tokoh agama, Organisasi Berbasis Komunitas
- Penguatan FKUB
- Regulasi pengelolaan rumah ibadah
- Penyiaran agama offline dan online
- Perayaan hari besar keagamaan

*) MB = Moderasi Beragama

MASYARAKAT

- Pelindungan Hak Beragama
- Pendidikan masyarakat
- Fasilitasi inovasi program kerukunan umat beragama
- Peningkatan literasi Moderasi Beragama
- Pengembangan referensi

Strategi Implementasi

Area Strategis Program Penguatan Moderasi Beragama di Kementerian/Lembaga

PUBLIK	PELAYANAN PUBLIK Implementasi Program dan Layanan Berperspektif Moderasi Beragama (MB)		
PROSES INTERNAL	KEBIJAKAN PUBLIK <ul style="list-style-type: none">Regulasi kebijakan publik berperspektif Moderasi BeragamaPenelaahan dan pengkajian praktik kehidupan keagamaan, regulasi dan bahan ajar	TATA LAKSANA <ul style="list-style-type: none">Penyusunan panduan pelayanan publik berperspektif MBReview kebijakan & pelayanan publikPenyelarasan kebijakan pelayanan publik dengan Penguatan MBPeningkatan literasi MBPengembangan Inovasi program & layanan berperspektif MB	PENGAWASAN <ul style="list-style-type: none">Pengembangan sistem pengawasan pelaksanaan pelayanan publik berperspektif MB
SDM & ORGANISASI	ORGANISASI <ul style="list-style-type: none">Pengembangan kerangka kerja implementasi PMB dengan mengacu kepada konsep dan kerangka kerja MBImplementasi kebijakan organisasi dalam Program Penguatan MB (PPMB)Dukungan anggaran implementasi PPMBPenyiapan pusdiklat untuk PPMB	POLA PIKIR & BUDAYA KERJA <ul style="list-style-type: none">Penguatan MB bagi ASN berdasar TusiPembangunan budaya kerja berperspektif MB:<ul style="list-style-type: none">➤ sosialisasi➤ internalisasiPeningkatan kapasitas widyaiswara untuk Program Penguatan MB	SISTEM MANAJEMEN ASN <ul style="list-style-type: none">Review sistem penilaian kinerjaPenyusunan muatan Penguatan MB dalam penilaian kinerja ASN



Terima Kasih

@Kementerian Agama 2020

